

ANALISIS PERFORMA KEBIJAKAN PENYALURAN BEASISWA KIP DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Husba Suhada¹, Eka Januar², Cut Zamharira³
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
husbasuhada88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam performa kebijakan penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek implementasi kebijakan menurut teori George Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui keterlibatan informan yang terdiri dari mahasiswa penerima, mahasiswa yang tidak lolos, biro akademik, serta panitia seleksi, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan, hambatan yang muncul dalam proses penyaluran, serta implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi beasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis berupa penguatan komunikasi digital, peningkatan literasi teknologi, optimalisasi alokasi anggaran, serta pengembangan mekanisme monitoring yang menyeluruh agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: **Analisis, Performa, Kebijakan, Beasiswa KIP**

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the performance of the Smart Indonesia Card (KIP) Scholarship distribution policy at UIN Ar-Raniry Banda Aceh using a qualitative case study approach. The research focuses on four aspects of policy implementation according to George Edward III's theory, namely communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Through the involvement of informants consisting of recipient students, unsuccessful students, the academic bureau, and the selection committee, this study seeks to uncover the extent to which the policy has been implemented, the obstacles that arise in the distribution process, and its implications for transparency, accountability, and fairness of scholarship distribution. In addition, this study also aims to formulate strategic recommendations in the form of strengthening digital communication, increasing technological literacy, optimizing budget allocation, and developing a comprehensive monitoring mechanism so that the policy can be implemented more effectively and on target.

Keywords: Analysis, Performance, Policies, KIP Scholarship

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal

31 UUD 1945. Pemerintah berkewajiban menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk penyediaan beasiswa. Beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi, serta investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa (Ajeng Diah Larasati, Dinda, Naila Ayu Aidah, Gustiputri, 2022).

Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada individu guna menunjang kelangsungan pendidikan yang sedang ditempuh, dan dapat bersumber dari lembaga pemerintah, perusahaan, maupun yayasan (Sugiyarti & Maselena, 2018). Beasiswa terbagi menjadi dua jenis, yaitu beasiswa penuh (*full scholarship*) yang menanggung seluruh biaya pendidikan termasuk biaya hidup, dan beasiswa sebagian (*partial scholarship*) yang umumnya hanya mencakup biaya kuliah, sementara kebutuhan lainnya ditanggung oleh penerima. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut mengalokasikan dana beasiswa, baik untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan, maupun bagi mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap pengembangan potensi mahasiswa (Ramadhon et al., 2017).

Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, transformasi dari Bidikmisi, ditujukan bagi mahasiswa kurang mampu namun berpotensi akademik agar dapat menempuh pendidikan tinggi hingga lulus tepat waktu. KIP Kuliah Merdeka bertujuan meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, dengan syarat lulusan SMA/SMK dua tahun terakhir, diterima di perguruan tinggi terakreditasi, dan memiliki bukti keterbatasan ekonomi (Silvester Viane Mado, 2025). Sejak Permendikbud Pasal 10 Tahun 2020, kebijakan ini diperkuat sebagai bagian dari wajib belajar 12 tahun dan perluasan akses pendidikan tinggi, didukung pula oleh program beasiswa lain seperti LPDP untuk meningkatkan daya saing bangsa (Indonesia, 2020).

UIN Ar-Raniry adalah Universitas Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Aceh yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UIN Ar-Raniry membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Aceh, termasuk melalui program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Penerima beasiswa KIP Kuliah mendapatkan keringanan biaya pendidikan selama 8 semester untuk program Strata I dan Diploma IV, 6 semester untuk Diploma III, dan 4 semester untuk Diploma II (Rauzalia, 2023).

**Tabel 1.1 Data penerima beasiswa kip/bidikmisi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Data Penerimaan Beasiswa Bidikmisi/KIP-K UIN Ar-Raniry	
Tahun	Penerima Beasiswa
2020	425 Mahasiswa
2021	430 Mahasiswa
2022	400 Mahasiswa
2023	630 Mahasiswa

Sumber: antara news.com

Jumlah penerima beasiswa Bidikmisi/KIP-K di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tercatat sebanyak 425 orang pada 2020, 430 orang pada 2021, 400 orang pada 2022, dan meningkat menjadi 630 orang pada 2023. Untuk memenuhi syarat penerimaan beasiswa, pelajar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau menunjukkan surat keterangan fakir/kurang mampu, serta melampirkan surat keterangan pendapatan orang tua (Ifdhal, 2023).

Beasiswa KIP berlaku hingga semester 8, dengan jumlah Rp6.600.000 per semester bagi mahasiswa Bidikmisi/KIP-K. Setelah dinyatakan lolos, mahasiswa dikenakan UKT sebesar Rp2.400.000. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan biaya pendidikan bagi penerima beasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 November 2014 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2015. Program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Pelaksanaannya melibatkan Direktorat Jenderal terkait, Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan. PIP diwujudkan melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas penerima bantuan pendidikan (Astuti et al., 2023)

Dalam wawancara dengan seorang mahasiswa UIN Ar-Raniry yang gagal menerima beasiswa KIP, ia menyatakan telah memenuhi semua syarat, termasuk sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Ia mendaftar beasiswa KIP saat memasuki semester kedua karena keberatan dengan UKT golongan 5 yang memberatkan keluarganya secara finansial. Namun, saat pengumuman, ia dinyatakan tidak lulus dan memutuskan berhenti kuliah di UIN Ar-Raniry. Mahasiswa tersebut kemudian mendaftar ulang di Universitas Syiah Kuala dan berhasil menjadi penerima beasiswa KIP. Ia mengkritik sistem seleksi di UIN Ar-Raniry yang dinilai tidak adil, mengklaim bahwa

penyeleksi lebih memperhatikan kondisi rumah tetangga daripada rumahnya sendiri, yang mengindikasikan adanya praktik orang dalam dan ketidakadilan dalam proses seleksi.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang mengedepankan pemerataan pendidikan dengan praktik implementasi di perguruan tinggi. Padahal, efektivitas pelaksanaan program sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai performa kebijakan penyaluran Beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6742 Tahun 2021 ditegaskan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP pada PTKIN wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, pihak pengelola beasiswa pun berkewajiban mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari mekanisme penyaluran hingga pengelolaan kuota penerima. Regulasi ini menjadi acuan penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan dampak nyata bagi pemerataan akses pendidikan tinggi (Agama, 2021).

Dalam penerapan beasiswa KIP, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk latar belakang penerima beasiswa. Beasiswa ini berlaku selama delapan semester dan bertujuan untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan mahasiswa secara objektif dan valid. Namun, masih ditemukan kasus di mana mahasiswa yang memenuhi syarat gagal menerima beasiswa, sementara ada pula penerima yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana performa kebijakan penyaluran beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan program Beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mulai dari perumusan masalah hingga tahap analisis yang berfokus pada lingkungan kampus tersebut. Subjek penelitian mencakup mahasiswa penerima beasiswa, mahasiswa yang gagal menjadi penerima, biro administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, panitia penyeleksi, yang semuanya dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Data diperoleh dari data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumen resmi. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi, sementara reliabilitas dijaga melalui konsistensi instrumen wawancara dan konfirmasi data kepada informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III dengan empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Nuraini &

Prathama, 2022). Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam bagaimana proses penyaluran beasiswa KIP dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah meluncurkan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai upaya untuk mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Ajeng et al, 2022). Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu perguruan tinggi yang memperoleh kuota beasiswa tersebut, mengingat sekitar 60% mahasiswanya berasal dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu (Ifdhal, 2024). Oleh karena itu, penyaluran beasiswa KIP-K di UIN Ar-Raniry perlu dilaksanakan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap citra institusi.

Komunikasi Penyaluran Beasiswa KIP DI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bidang Kemahasiswaan UIN Ar-Raniry menjelaskan bahwa komunikasi terkait pelaksanaan *open recruitment* calon penerima Beasiswa KIP diawali dengan penyampaian surat edaran mengenai kuota yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada pimpinan universitas. Kuota tersebut bersifat dinamis karena setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan maupun penurunan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan kuota mengharuskan pihak universitas bersikap lebih selektif dalam menentukan penerima yang berhak, sementara jumlah pendaftar relatif tinggi setiap tahun. Informasi mengenai kuota kemudian diteruskan oleh Wakil Rektor III kepada Bidang Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti. Setelah menerima arahan, Bidang Kemahasiswaan menyusun strategi bersama staf dan tim internal guna memastikan kelancaran pelaksanaan *open recruitment*. Selanjutnya, kerja sama dilakukan dengan Humas UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menyebarluaskan informasi pembukaan pendaftaran beasiswa. Langkah ini bertujuan agar seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry dapat memperoleh akses informasi pendaftaran Beasiswa KIP secara lebih mudah, merata, dan transparan.

Penjelasan di atas ialah gambaran proses komunikasi dan koordinasi dalam *open recruitment Beasiswa KIP* di UIN Ar-Raniry. Informasi kuota beasiswa disampaikan Kementerian Agama kepada pimpinan universitas secara formal melalui surat edaran, namun kuota yang dinamis setiap tahun menimbulkan tantangan, karena universitas harus selektif menghadapi jumlah pendaftar yang tinggi. Untuk mengatasinya, Bidang Kemahasiswaan menyusun strategi bersama tim internal dan bekerja sama dengan Humas untuk memastikan penyebaran informasi pendaftaran berjalan merata, transparan, dan efektif. Keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi internal, kolaborasi eksternal, serta efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, Kementerian Agama disarankan menambah kuota beasiswa agar setiap perguruan tinggi memiliki peluang lebih proporsional dalam menyalurkan bantuan kepada mahasiswa yang berhak.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan suatu program. (Fitria Yunita Manggopa, Moch Sakir, 2024) menyatakan bahwa komunikasi antara organisasi dan pelaksana kegiatan menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan, yang harus dilakukan secara konkret untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Senada dengan itu, (Widdy Yuspita Widiyaningrum & Fachira Salsabila, 2024) Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses penyampaian informasi yang dapat berupa ide, pesan, gagasan, maupun pemikiran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Proses ini berfungsi sebagai jembatan untuk menyamakan persepsi dan membangun pemahaman bersama. Secara umum, komunikasi berlangsung melalui bahasa lisan atau bentuk verbal lain yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga interaksi yang terjadi menjadi lebih efektif dan bermakna (Alhadar, 2020).

Panitia penyeleksi dan tim survei lapangan menyampaikan bahwa seluruh anggota tim memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Beasiswa KIP. Ketua Panitia atau Koordinator Program bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses, termasuk memastikan kebijakan tersampaikan dengan tepat serta menjadi pengambil keputusan strategis dalam aspek komunikasi. Struktur tim pelaksana terdiri dari tim penyeleksi administrasi, tim wawancara, dan tim survei lapangan yang saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, strategi yang dapat diterapkan antara lain pemanfaatan beragam media komunikasi, baik digital maupun tradisional seperti papan pengumuman kampus, penyajian informasi yang ringkas dan mudah dipahami, serta penyediaan nomor khusus yang responsif sebagai sarana konsultasi. Selain itu, kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal dipandang penting guna memastikan sosialisasi informasi dapat menjangkau seluruh calon penerima secara merata dan adil.

Peneliti menemukan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan oleh tim penyeleksi didasarkan pada perkembangan teknologi digital. Meskipun demikian, mereka tetap memanfaatkan media tradisional, seperti papan informasi di kampus. Namun, penggunaan papan informasi ini dinilai kurang efektif karena tidak tersedia di seluruh fakultas, sehingga distribusi informasi menjadi tidak merata. Kendati demikian, keterbatasan tersebut relatif dapat diatasi melalui pemanfaatan media digital sebagai saluran komunikasi pendukung.

Meskipun strategi komunikasi yang diterapkan oleh tim penyeleksi telah memadukan penggunaan media digital dan tradisional, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kecakapan komunikasi digital. Pendekatan yang digunakan masih berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah, bukan pada kemampuan membangun interaksi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi. Kondisi ini berlawanan dengan pandangan (Badri, 2022) yang

menegaskan bahwa kecakapan komunikasi digital tidak hanya sebatas penggunaan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, serta berkolaborasi secara aktif dalam ekosistem digital yang dipengaruhi oleh faktor sosial maupun ekonomi.

Mahasiswa penerima Beasiswa KIP menyatakan bahwa awalnya mereka hanya memperoleh informasi tentang pembukaan pendaftaran melalui pengumuman, tanpa penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Informasi selanjutnya terkait persyaratan pendaftaran, seperti KIP, KKS, DTKS, surat keterangan tidak mampu, dan batas pendapatan orang tua maksimal Rp4.000.000 per bulan atau Rp750.000 per anggota keluarga. Persyaratan ini mencerminkan kondisi ekonomi keluarga yang berhak mengajukan beasiswa. Namun, pada tahap awal, mahasiswa mengalami kesulitan karena kanal pengaduan belum tersedia, sehingga akses klarifikasi baru terbuka menjelang tahap wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima Beasiswa KIP, peneliti menemukan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini sudah tergolong memuaskan, namun masih memerlukan perbaikan. Diperlukan pengembangan atau pembentukan sebuah platform khusus yang dapat digunakan mahasiswa sebagai sarana pengaduan maupun konsultasi apabila menghadapi kendala. Dengan adanya platform ini, mahasiswa tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga dalam menyampaikan permasalahan yang mereka alami, melainkan dapat langsung berkomunikasi dengan pihak kemahasiswaan secara efektif dan transparan.

Pandangan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem komunikasi yang responsif dan partisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Aisyah et al., 2024), di era digital, sistem pengaduan online merupakan salah satu inovasi penting dalam teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Contohnya, penerapan Sistem Layanan Pengaduan Aspirasi Rakyat Online (LAPOR) di Indonesia menunjukkan bahwa kanal digital dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun permintaan informasi secara langsung tanpa perantara. Oleh karena itu, penguatan platform serupa dalam konteks pengelolaan beasiswa menjadi sangat relevan untuk mendukung komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pihak pengelola, sekaligus menghadirkan inovasi signifikan yang berkontribusi pada peningkatan ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Sumber Daya Penyalur Beasiswa KIP DI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bidang Kemahasiswaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki tergolong cukup memadai, mencakup aspek sumber daya manusia, teknologi, anggaran, serta sarana dan prasarana. Staf yang tersedia dinilai kompeten, khususnya dalam pengoperasian komputer, sehingga mampu mendukung kelancaran

proses *open recruitment* Beasiswa KIP. Meskipun demikian, kendala masih ditemukan pada aspek anggaran, terutama dalam tahap monitoring yang memerlukan biaya tambahan untuk memverifikasi data mahasiswa yang telah lolos seleksi administratif. Monitoring tersebut bersifat terbatas dan hanya dilakukan terhadap mahasiswa yang telah melewati tahap seleksi berkas awal, guna memastikan keabsahan dokumen yang dikumpulkan. Perlu dicatat bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan bersumber dari universitas, sedangkan dana dari Kementerian Agama hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

peneliti menemukan bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki sumber daya yang relatif memadai, khususnya dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dalam pengoperasian teknologi, sehingga mampu mendukung kelancaran proses rekrutmen Beasiswa KIP. Namun, kendala utama terletak pada aspek anggaran. Kementerian Agama hanya menyalurkan dana bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa, tanpa menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung proses rekrutmen terbuka maupun tahapan seleksi awal. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tahap monitoring dan validasi berkas calon penerima. Akibatnya, kegiatan monitoring tidak mencakup seluruh pendaftar, dan proses seleksi lebih banyak bergantung pada penilaian administratif berbasis unggahan dokumen. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidakadilan, di mana mahasiswa yang sebenarnya layak menerima beasiswa justru tereliminasi hanya karena kekurangan pada dokumen, tanpa adanya verifikasi langsung di lapangan.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kemampuan fisik dan nonfisik. Kemampuan fisik mencakup kekuatan serta keterampilan praktis, sedangkan kemampuan nonfisik meliputi pengetahuan, kecerdasan, kreativitas, dan etos kerja. Oleh karena itu, peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi syarat utama dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang (Yani et al., 2021). Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin bagi lembaga atau satuan penyelenggara pendidikan dituangkan dalam DIK (Daftar Isian Kegiatan), sedangkan biaya pembangunan dialokasikan melalui DIP (Daftar Isian Proyek) (Batubara, 2022). Mekanisme ini sejalan dengan tahapan penyusunan anggaran yang secara konseptual mencakup formulasi kebijakan dan perencanaan operasional, yang kemudian dilanjutkan pada tahap realisasi anggaran sebagai proses pelaksanaan atas seluruh rencana yang telah disusun. Pelaksanaan program berfungsi sebagai pedoman operasional agar penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari DIK maupun DIP, dapat berlangsung secara selaras dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Riinawati, 2020).

Peneliti menemukan bahwa seluruh panitia memiliki peran penting dalam pelaksanaan Beasiswa KIP, dengan Biro Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab utama, meskipun keputusan akhir tetap melibatkan pihak rektorat. Namun, proses

penyaluran informasi secara daring masih menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan sumber daya digital. Sejumlah mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat digital, serta rendahnya tingkat literasi teknologi. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara merata dan menimbulkan kesalahan dalam pengisian data. Situasi ini berdampak pada melemahnya akurasi dan efektivitas proses seleksi, sehingga perlu diimbangi dengan pemanfaatan media tradisional, seperti papan pengumuman, serta pelaksanaan verifikasi data secara langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam penyaluran informasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat literasi digital penerima informasi. Sebagaimana diungkapkan oleh (Tanggur, 2022), literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dari sumber digital, yang dalam praktiknya sering menjadi tantangan tersendiri. Ketidakmampuan sebagian mahasiswa dalam mengakses, memahami, dan mengelola informasi digital menegaskan bahwa hambatan yang muncul bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga konseptual. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi kunci penting dalam memperkuat efektivitas komunikasi pada program beasiswa.

Bentuk Disposisi Penyaluran Beasiswa KIP DI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bidang Kemahasiswaan menyampaikan bahwa disposisi staf yang dimiliki tergolong sangat baik. Setiap individu dinilai memiliki kompetensi yang memadai serta pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam mendukung kelancaran proses *open recruitment* calon penerima Beasiswa KIP. Selain itu, disposisi pimpinan universitas dalam menyampaikan informasi terkait *open recruitment* juga dianggap tertib dan sah. Hal ini ditunjukkan melalui penyampaian surat keputusan resmi dari Rektor yang telah dilegalisasi dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peneliti menemukan bahwa penilaian positif yang disampaikan oleh pihak internal perlu ditelaah secara lebih kritis. Pengakuan terhadap disposisi staf yang dinilai “sangat baik” berpotensi bersifat subjektif karena tidak disertai tolok ukur kinerja yang terukur maupun umpan balik dari pihak eksternal, seperti mahasiswa penerima beasiswa. Selain itu, meskipun informasi telah disampaikan secara resmi melalui surat keputusan, efektivitas penyampaian informasi pada tingkat implementasi teknis masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan bahwa instruksi dari pimpinan benar-benar diterjemahkan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan. Dengan demikian, meskipun disposisi struktural tampak baik secara formal, keberhasilan implementasi tetap memerlukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja individu serta penguatan sistem komunikasi yang lebih responsif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, disposisi implementor mencakup tiga aspek utama, yaitu respons terhadap kebijakan, kognisi atau pemahaman terhadap isi

kebijakan, serta intensitas disposisi yang mencerminkan komitmen dalam pelaksanaannya (Setiawati & Rahaju, 2022). Dalam konteks pelaksanaan rekrutmen, sikap para penanggung jawab menunjukkan tingkat disposisi yang tinggi. Mereka melaksanakan tugas dengan penuh totalitas, rasa tanggung jawab, dan kesadaran diri yang kuat. Setiap tugas dijalankan sesuai dengan rincian yang telah ditetapkan serta berpedoman pada aturan yang berlaku, sehingga mencerminkan pemahaman yang baik dan sikap positif terhadap kebijakan yang diimplementasikan (Diansari et al., 2019).

Proses seleksi Beasiswa KIP sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme panitia serta karakter mahasiswa sebagai calon penerima. Panitia dituntut untuk bersikap objektif, jujur, teliti, dan empatik dalam menilai kelayakan berdasarkan dokumen yang sah. Mahasiswa dinyatakan layak menerima beasiswa apabila berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan melalui dokumen resmi, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa, atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki potensi akademik atau prestasi, serta menunjukkan kejujuran dan komitmen, misalnya melalui capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal. Dengan demikian, kolaborasi antara sikap adil panitia dan karakter mahasiswa yang jujur serta berprestasi menjadi kunci keberhasilan penyaluran Beasiswa KIP secara tepat sasaran.

Peneliti menemukan bahwa disposisi panitia seleksi menunjukkan pemahaman yang baik bahwa penerima Beasiswa KIP pada dasarnya adalah mahasiswa dengan keterbatasan finansial, yang menjadi prioritas utama sebelum kemudian dipertimbangkan dari aspek akademik. Namun, pembuktian kondisi finansial sering kali menjadi tantangan, mengingat tidak jarang terdapat mahasiswa yang memanipulasi data demi memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, panitia seleksi perlu menindaklanjuti persoalan ini dengan menerapkan sistem monitoring yang menyeluruh terhadap seluruh pendaftar, bukan hanya mahasiswa yang telah lolos tahap penyaringan. Langkah ini penting karena masih terdapat kemungkinan mahasiswa yang sebenarnya lebih layak menerima beasiswa justru tidak lolos seleksi berkas akibat keterbatasan dalam proses verifikasi awal.

Fenomena ini menegaskan urgensi penerapan sistem monitoring dan verifikasi yang lebih komprehensif dalam proses seleksi beasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Sariri & Prabawati, 2024), yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam seleksi penerima beasiswa adalah ketidakakuratan data yang disampaikan oleh calon mahasiswa, khususnya terkait alamat tempat tinggal. Praktik manipulasi data semacam ini menyulitkan pihak pengelola dalam menilai kondisi riil mahasiswa, sehingga diperlukan langkah konkret berupa klarifikasi lapangan. Upaya tersebut, misalnya, telah diterapkan oleh Unesa melalui survei langsung ke lingkungan tempat tinggal calon penerima. Dengan demikian, keberadaan sistem verifikasi yang kuat

menjadi kunci agar beasiswa benar-benar tersalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria secara jujur, tepat sasaran, dan akurat.

Struktur Birokrasi Pemyaluran Beasiswa KIP DI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bidang Kemahasiswaan mengungkapkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program penyaluran Beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh direalisasikan melalui Kementerian Agama yang kemudian didelegasikan kepada pimpinan universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor III. Selanjutnya, mandat tersebut disampaikan kepada Bidang Kemahasiswaan selaku penanggung jawab utama proses penyaluran, termasuk tahapan *open recruitment*. Pada tahap ini, Bidang Kemahasiswaan tidak bekerja secara mandiri dalam melakukan verifikasi, melainkan dibantu oleh tim penyeleksi yang berperan sebagai pewawancara sekaligus tim monitoring. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam proses penyaluran beasiswa melibatkan berbagai institusi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Peneliti menemukan bahwa penyaluran beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh melibatkan banyak sumber daya manusia dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pihak Kemahasiswaan tidak bekerja secara mandiri, melainkan mendapat dukungan dari tim yang tidak secara langsung termasuk dalam staf bidang Kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bidang Kemahasiswaan memiliki staf yang kompeten, pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, struktur birokrasi dalam penyaluran beasiswa harus berada di bawah koordinasi pimpinan bidang Kemahasiswaan, yaitu Wakil Rektor III selaku penanggung jawab utama penyaluran beasiswa KIP. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kesepakatan seluruh struktur birokrasi terkait.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kesesuaian antara peran dan kompetensi dalam struktur birokrasi. (Reliubun et al., 2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip *the right man on the right job* dalam suatu lembaga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas birokrasi. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya memungkinkan struktur organisasi berfungsi secara optimal. Dalam konteks penyaluran beasiswa KIP, keterlibatan tim pendukung di luar staf Kemahasiswaan mencerminkan adanya upaya untuk memastikan setiap elemen birokrasi menjalankan perannya sesuai kapasitas masing-masing, sehingga pengelolaan program dapat berlangsung lebih efisien, terarah, dan berkelanjutan.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagai penerima Beasiswa KIP mengungkapkan bahwa informasi pendaftaran diperoleh melalui komunikasi dari pihak Kemahasiswaan, Humas, serta unit terkait di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Informasi tersebut disampaikan melalui media sosial resmi, seperti @uin_arraniry_official, @infouinarraniry, dan @bidikmisi_uinarraniry, yang memuat persyaratan administrasi, tenggat waktu, serta langkah-langkah teknis pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan

secara daring melalui laman resmi universitas untuk pengunggahan dokumen. Namun, mahasiswa tidak mengetahui adanya tahap penyaringan awal, di mana setelah wawancara pertama dilakukan penentuan mahasiswa yang akan dikunjungi oleh panitia.

Peneliti menemukan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP memperoleh informasi mengenai pendaftaran melalui platform resmi yang dimiliki universitas dan mengunggah berkas pada laman yang telah disediakan. Namun, dalam proses verifikasi terdapat tahapan eliminasi awal, di mana mahasiswa yang tereliminasi tidak lagi menjalani visitasi. Padahal, tujuan visitasi tersebut adalah untuk memeriksa keaslian berkas yang dikumpulkan pada saat pendaftaran. Idealnya, visitasi dilakukan terhadap seluruh mahasiswa yang mendaftar, mengingat tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang gugur pada tahap penyaringan awal justru merupakan calon penerima yang lebih membutuhkan.

Situasi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam mekanisme verifikasi tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan kebutuhan akan struktur birokrasi yang lebih tertata dan sistematis dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa. Dalam konteks ini, pandangan (Fadila et al., 2024) menjadi relevan, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keberadaan struktur birokrasi yang kuat. Susunan organisasi yang jelas, standar operasional prosedur (SOP) yang sistematis, serta pengawasan yang konsisten merupakan elemen kunci agar kebijakan dapat dijalankan secara adil dan menyeluruh. Tanpa dukungan birokrasi yang terstruktur dengan baik, tahapan penting seperti visitasi berisiko tidak terlaksana secara merata dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon penerima yang sebenarnya lebih membutuhkan, tetapi justru tereliminasi pada tahap awal.

Panitia penyeleksi menyatakan bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran proses seleksi beasiswa KIP melalui pembagian tugas yang terorganisir, mencakup seleksi administrasi, wawancara, hingga verifikasi lapangan. Proses tersebut berjalan selaras dengan mekanisme monitoring, di mana seluruh pendaftar mengikuti tahap seleksi awal, sedangkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dipantau secara berkala untuk memastikan kelayakan secara berkelanjutan. Dengan adanya struktur yang jelas, panitia dapat menyinkronkan data administratif dengan hasil wawancara serta kondisi riil di lapangan, sehingga proses seleksi dan monitoring berlangsung lebih akurat, transparan, dan objektif.

Peneliti menemukan bahwa terdapat tahapan evaluasi yang berfungsi untuk melakukan verifikasi terhadap berkas yang dikumpulkan mahasiswa pada saat pendaftaran, yang dilaksanakan secara langsung di lapangan atau disebut monitoring. Namun, monitoring tersebut hanya dilakukan terhadap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tahap awal seleksi, bukan mencakup seluruh pendaftar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mahasiswa yang sesungguhnya lebih layak justru

dapat tereliminasi akibat berkas yang diunggah tidak diverifikasi lebih lanjut, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh beasiswa.

Kondisi ini menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring yang bersifat menyeluruh dan adil sebagai bagian integral dari tahapan evaluasi dalam program beasiswa. Dalam kaitannya, (Samsuddin, 2023) menjelaskan bahwa monitoring merupakan kegiatan esensial untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, monitoring seharusnya dilaksanakan secara sistematis guna menghimpun data yang akurat dan relevan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembatasan monitoring hanya terhadap peserta yang lolos pada tahap awal berpotensi menurunkan validitas evaluasi serta dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses distribusi beasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, monitoring seharusnya dilaksanakan secara sistematis untuk mengumpulkan data yang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembatasan monitoring hanya pada peserta yang lolos tahap awal dapat menurunkan kualitas evaluasi serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyaluran beasiswa.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji performa kebijakan penyaluran Beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan empat indikator teori implementasi George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian meliputi mahasiswa penerima, mahasiswa yang tidak lolos, biro akademik, serta panitia seleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, performanya masih belum optimal. Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi cenderung satu arah (top-down) sehingga distribusi informasi tidak merata. Penggunaan media digital dan tradisional sudah dilakukan, tetapi papan informasi dinilai kurang efektif karena tidak tersedia di semua fakultas, ditambah ketiadaan platform pengaduan khusus yang menyulitkan mahasiswa dalam melakukan klarifikasi maupun menyampaikan keluhan. Dari aspek sumber daya, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dinilai cukup baik, terutama dalam penguasaan teknologi, namun kendala anggaran menjadi hambatan karena anggaran dari Kementerian Agama hanya dialokasikan untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa.

Hal ini membuat proses monitoring tidak berjalan komprehensif dan verifikasi hanya terbatas pada berkas awal. Dari aspek disposisi, pelaksana program menunjukkan sikap positif dan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berjalan sesuai prosedur dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian Agama, pimpinan universitas, hingga tim penyeleksi. Namun, sistem verifikasi hanya dilakukan pada penerima awal sehingga berpotensi menimbulkan

ketidakadilan, karena bisa saja mahasiswa yang lebih membutuhkan dapat tereliminasi sejak tahap awal tanpa verifikasi lanjutan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Beasiswa KIP di UIN Ar-Raniry sudah terlaksana, tetapi masih memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan jumlah kuota dan alokasi anggaran dari Kementerian Agama untuk mendukung proses seleksi dan monitoring, penguatan komunikasi berbasis digital, serta peningkatan literasi teknologi agar penyaluran beasiswa dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, adil, dan tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6743 Tahun 2021*. 1–23.
- Aisyah, E. N. A., Nabila, D. S., & Sabrina, M. A. (2024). Penerapan Platform LAPOR Sebagai Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Digital Di Kota Malang. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 92–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3892>
- Ajeng Diah Larasati, Dinda, Naila Ayu Aidah, Gustiputri, S. N. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>
- Alhadar, S. (2020). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 2 Desember 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- Astuti, D., Febriyanti, D., & Kariem, M. Q. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Pip) Di Kelurahan Tuan Kentang Tahun 2020. *TheJournalish: Social and Govverment*, 4(3), 249–256. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.435>
- Badri, M. (2022). Pribumi Digital Moderat: Profil Kecakapan Komunikasi Digital Generasi Z. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(2), 291–303. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.653>
- Batubara, H. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Diansari, D., Sriati, & Lionardo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 3, 40–50.
- Fadila, C., Angelia, N., & Kurniaty, E. Y. (2024). *Implementasi Peraturan Gubernur*

Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai Di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 6(2), 135–141.
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4456>

- Fitria Yunita Manggopa, Moch Sakir, R. (2024). Analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(3), 2757–2774. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/595%0Ahttps://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/595/534>
- Ifdhal, M. (2023). UIN Ar-Raniry bekali 400 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/3811689/uin-arraniry-bekali-400-mahasiswa-penerima-beasiswa-kip-kuliah>
- Ifdhal, M. (2024). Rektor: 60 persen mahasiswa UIN dari keluarga kurang mampu. *Antara*. <https://aceh.antaranews.com/berita/357309/rektor-60-persen-mahasiswa-uin-dari-keluarga-kurang-mampu>
- Indonesia, P. M. P. dan K. R. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. In *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>
- Nuraini, R. E., & Prathama, A. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i3.354>
- Ramadhon, R., Jaenudin, R., & Fatimah, S. (2017). Pengaruh Beasiswa terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. *Jurnal Profit*, 4(2), 203–2013.
- Rauzalia. (2023). Evaluasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/36299/1/Rauzalia%2C190802088%2CFISIP%2CIAN.pdf>
- Reliubun, S. Z., Ismail, I., & Juharni, J. (2023). Aktualisasi Prinsip The Right Man ini The Right Job Dalam Struktur Birokrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Paradigma Journal of Administration*, 1(2), 65–69. <https://doi.org/10.35965/pja.v1i2.3873>
- Riinawati. (2020). *Manajemen Keuangan Pendidikan*.

- Samsuddin. (2023). Polisi Selidiki Pengelolaan Dana KIP UGP Takengon. *Haba Aceh*. <https://www.habaaceh.id/news/polisi-selidiki-pengelolaan-dana-kip-ugp-takengon/index.html>
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 12(1), 238–251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 10(2), 609–620. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p609-620>
- Silvester Viane Mado, F. Y. B. 2. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Penerima Beasiswa Kip Kuliah Menggunakan Metode Aras Dan Borda Count Di Stikom Uyelindo Kupang Berbasis Web. *JITET (Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(3).
- Sugiyarti, E., & Maselena, A. (2018). Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penyeleksian Pemilihan Penerima Beasiswa SMA N 1 Ulubelu Tanggamus Menggunakan Data Mining. *Konferensi Mahasiswa Sistem Informasi*, 6(1), 62–69.
- TANGGUR, F. S. (2022). Literasi Digital Dalam Perspektif Guru Di Wilayah Pedesaan Pulau Timor. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 5(2), 286–294. <https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i2.818>
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, & Fachira Salsabila. (2024). Implementasi Program Beasiswa Ti Bupati (Besti) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 772–787. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.4444>
- Yani, A., Mutu Layanan, P., Agrisa Ditama, R., & Munawir Pohan, M. (2021). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021 Peningkatan Mutu Layanan Melalui Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Sumber Daya Alam, VIII(kualitas Pelayanan)*, 1–171.